

Di Kalbar, BPK Gelar Tata Kelola Keuangan Zero Penyimpangan

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Presiden SBY dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 7 Februari lalu, di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin, diadakan pembahasan tata kelola keuangan zero penyimpangan.

ACARA yang digelar di Hotel Mercure itu bertajuk Rapat Koordinasi Se-Provinsi Kalimantan Barat yang membahas strategi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah untuk Pencegahan Penyimpangan menuju tata kelola keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari BPK pusat diwakili anggota BPK Rizal Djallil. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalbar Cornelis, Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudiby, bupati dan walikota Se-Kalbar.

Dalam paparannya, Rizal mengatakan, yang dilakukan di Pontianak merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden SBY dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dimana saat itu BPK diminta melakukan upaya pencegahan penyimpangan keuangan negara.

"Maka, BPK mengambil inisiatif untuk terus melakukan upaya pencegahan penyimpangan keuangan negara. Kita anggap, Kalimantan Barat sangat siap me-



ANGGOTA BPK Rizal Djallil (tengah) didampingi **Gubernur Kalbar Cornelis** (kiri) dan **Kepala Perwakilan BPK Kalbar Adi Sudiby** saat Rapat Koordinasi Se-Provinsi Kalbar, membahas strategi pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk pencegahan penyimpangan menuju tata kelola keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Kalbar, kemarin.

lakukan hal itu," tegas Rizal.

Dikatakan Rizal, mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara jauh lebih baik daripada menanggung akibat dari penyimpangan itu di kemudian hari.

Menurut Rizal, mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melaksanakan sepenuhnya semua regulasi yang terkait dengan keuangan negara secara konsisten. Kedua, menye-

lesaikan sedini mungkin semua tindak lanjut yang diminta BPK.

"Semua kasus yang menimpa kepala daerah terjadi karena mereka tidak melaksanakan semua tindak lanjut yang diminta BPK," jelas Rizal, bekas anggota

DPR yang juga doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, ini.

Selain itu, Rizal juga mengingatkan agar Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalbar hati-hati dalam menggunakan APBD. ■ **TIM**